

Kualitas Kerja Aparat Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Distrik Aimas Kabupaten Sorong

Yohana Sophya Tuhumena¹, Amiruddin², Arie Purnomo³

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sorong

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisa pengaruh kualitas kerja aparat pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan, untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh aparat pemerintah Distrik Aimas dalam mengatasi masalah pembangunan, dan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Aparatur Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), wawancara (*Interview*) dan pengamatan/observasi. Dari hasil analisis yang dilakukan maka kinerja pegawai dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus lebih profesional karena aparat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan, pemerintah harus berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. dalam menetapkan suatu peraturan harus ditunjang dengan kedisiplinan pegawai negeri agar kinerja aparat pemerintah dapat berjalan dengan baik dalam menunjang pelaksanaan pembangunan

Kata Kunci: Kualitas Kerja, Aparat Pemerintah, Distrik Aimas

PENDAHULUAN

Berdasarkan cita-cita bangsa Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat aparat pemerintah di daerah merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah di daerah serta pemberian pelayanan Kepada masyarakat.

Konsep umum yang dimaksud adalah manusia berusaha baik melalui aktivitas sendiri, maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal pikiran, panca indra dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Proses kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung itulah yang dimaksud pelayanan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, daerah harus sudah mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi dasar dalam menyusun rencana program pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kemudian dijabarkan pada rencana pengembangan kabupaten/kota yang mencakup pula penyusunan struktur dan sistem infrastruktur kota. Rencana pengembangan kabupaten/kota berfungsi sebagai penentu arah pengembangan fisik ruang dan

pengembangan pelayanan publik ruang, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) dan dalam mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari perubahan perkembangan kondisi ekologi administrasi public, terutama yang terjadi di Indonesia saat ini sebagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyesuaian-penyesuaian dalam penerapan strategi pembangunan. Dalam hubungan ini, tantangan yang dimaksud meliputi :

- a. Penerapan Otonomi Daerah
- b. Globalisasi Informasi
- c. Netralitas Pegawai Negeri
- d. Penerapan multi partai dalam sistem politik
- e. Perdagangan bebas dan
- f. Semangat reformasi dengan segala implikasinya

Dalam hubungan ini kualitas perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjawab tantangan perubahan tersebut dengan tetap berpijak pada strategi pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan konsep pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan menghasilkan rencana pembangunan dengan strategi untuk menjawab segala tantangan, serta sasaran yang diinginkan yang didukung oleh tingkat kemampuan aparat birokrasi pemerintah mengantisipasi faktor-faktor yang berpengaruh baik integral berupa kekuatan dan kelemahan maupun eksternal berupa berbagai peluang maupun ancaman yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

Tugas pokok pemerintah tersebut dapat dijabarkan kedalam berbagai urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yaitu :

- a. Pemenuhan kepentingan masyarakat maupun mengatasi masalah-masalah masyarakat
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Peningkatan kemampuan financial pemerintah
- d. Kewenangan mengatur

Pembangunan berorientasi pada upaya mencapai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat yang didukung oleh pengorganisasian dan partisipasi masyarakat selaku subyek pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan aparat Kelurahan mempunyai peranan penting, dimana kinerja aparat sangat diperlukan apa bila kinerja aparat tidak efisien, maka pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Dan sebaliknya juga dimana masyarakat juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan harus ada hubungan timbal-balik antar

warga/masyarakat setempat dan aparat setempat demi kelancaran pembangunan di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan fokus Pengaruh Kualitas Kerja Aparat Distrik Aimas dalam pelaksanaan pembangunan, maka panulis mengadakan penelitian dengan judul “*Kualitas Kerja Aparat Pemerintah Terhadap Pembangunan Di Distrik Aimas Kabupaten Sorong*”

METODE PENELITIAN

1. Penelitian Kepustakaan (*Libbrary Reserch*)

Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah upaya atau cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang memuat buah pikiran atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam Skripsi ini.

2. *Interview* (Wawancara)

Yaitu cara mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara langsung terhadap orang pegawai sebagai responden yang berwenang dan dianggap mengetahui permasalahan penelitian.

3. Pengamatan atau observasi

Untuk dapat memperoleh data dan informasi yang akurat, maka penelitian dilaksanakan pada Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Aparat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.

Dalam pelaksanaan pembangunan dinegara-negara berkembang tidak terlepas pula dari teori-teori pembangunan yang dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun menilai dan mengukur kinerjanya. Teori pembangunan yang diterapkan adalah teori pembangunan yang berusaha memecahkan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang yang tentunya berbeda dengan teori pembangunan di negara yang telah maju, karena berbagai faktor yang mempengaruhi, salah satunya misalnya untuk negara miskin (sedang berkembang) menghadapi persoalan bagaimana mempertahankan hidup (*survival*) sedangkan di

negara yang sudah maju (adi kuasa) yang telah mencapai kemapanan sosial ekonominya (*establish*) persoalan yang dipikirkan adalah bagaimana mengembangkan politik prestisenya atau bahkan bagaimana benar-benar menjadi “polisi dunia” dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun militer dari bangsa-bangsa di dunia (diadaptasi dari Agus Suryono:2001).

Secara umum pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat. Hakikat pembangunan ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Pembangunan nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Selanjutnya pembangunan nasional harus diselenggarakan diseluruh secara merata diseluruh Negara, bagi seluruh masyarakat dan bukan ditujukan untuk kepentingan sesuatu golongan atau kelompok. Hasil pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat dalam bentuk peningkatan taraf hidup dan kualitas kehidupam manusia dan masyarakat.

Dalam pembangunan nasional manusia merupakan titik sentral, yang berarti bahwa seluruh kegiatan pembangunan nasional harus diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Suatu bangsa selalu menghendaki adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dengan masyarakat, antara manusia dengan lingkungannya dengan cita-cita kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat.

Strategi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) ini belajar dari pengalaman pelaksanaan pembangunan pada dasawarsa ketiga dengan munculnya konsep tata ekonomi dunia baru sebagai upaya perbaikan sosial ekonomi negara berkembang dengan strategi pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pertahun. Pada dasawarsa ini pusat perhatian proses pembangunan berkaitan dengan masalah kependudukan yang meningkat pesat (population boom), urbanisasi, kemiskinan, kebodohan, partisipasi masyarakat, organisasi sosial politik, kerusakan lingkungan dan masyarakat pedesaan. Dalam dasawarsa ini masih manghadapi masalah yakni pelaksanaan pembangunan tidak berdemensi pada pembangunan manusia, sehingga pada gilirannya berpengaruh pada timbulnya masalah ketidakadilan, kelangsungan hidup dan ketidak terpaduan pembangunan.

Seluruh kebutuhan mekanisme manajemen pembangunan baik dalam rangka manajemen pembangunan nasional maupun manajemen pembangunan daerah sejak dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, hingga Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dapat dilakukan secara komputasi dengan dukungan penerapan teknologi informatika.

Berdasarkan proses penelitian yang peneliti lakukan maka dapat di peroleh hasil data yang penulis temukan di Distrik Aimas Kabupaten Sorong terdapat beberapa sarana dan prasarana berupa 5 buah jalan beton, 1 unit posyandu dan pasar.

Bersarkan hasil wawancara penulis dengan kepala distrik pada tanggal 24 Oktober 2015, beliau menyampaikan bahwa : “di Distrik Aimas Kabupaten Sorong sarana dan prasarana sudah sangat menunjang dengan adanya beberapa bangunan secara fisik yang akan terus di bangun secara perlahan dan bertahap, dan bisa sisaksikan saat ini geliat pembangunan di Distrik Aimas Kabupaten Sorong terus meningkat”.

Pernyataan kepala distrik tersebut dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dan observasi yang peneliti lakukan maka didapat data pembangunan yang selama ini telah dilakukan pada di Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Dari hasil data yang penulis temukan di Distrik Aimas Kabupaten Sorong terdapat beberapa sarana dan prasarana berupa 5 buah jalan beton, 1 unit posyandu dan pasar.

Menurut hasil penelitian di Distrik Aimas sarana dan prasarana sudah sangat menunjang dengan adanya beberapa bangunan secara fisik yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Data Infrastruktur Distrik Aimas Secara Fisik Tahun 2014

NO	NAMA JALAN	POSYANDU	PASAR	RELISASI
1	Jl. Kamboja di Beton	Posyandu anggrek putih Di Aimas	Pasar tertata Unit Dua	Terlaksana
2	Jl. Tutturuga Di Beton			Terlaksana
3	Jl. Kenanga Di Beton			Terlaksana
4	Jl. Mawar Di Beton			Terlaksana

Sumber : Kantor Distrik Aimas Kabupaten Sorong

Data yang telah disajikan diatas akan di perkuat lagi denga data berupa program-program non fisik yang telah di laksanakan pada Distrik Aimas Kabupaten Sorong yang telah dilakukan selama ini. Hal tersebut diperkuat juga dengan wawancara peneliti kepada masyarakat Distrik Aimas Kabupaten Sorong yang di sampakan seperti berikut ini.

Berdasarkan hasil wawancara penelti dengan masyarakat setempat yang di lakukan pada tanggal 24 oktober 2015, menyatakan bahwa : “ pembangunan yang di laksanakan di Distrik Aimas Kabupaten Sorong bukan sekedar pembangunan fisik saja tapi ada pembangunan non fisik berupa program-program sosialisasi dan penyuluhan yang di lakukan oleh petugas dari distrik kepada

masyarakat, hal ini telah dilakukan secara rutin dalam beberapa tahun ini”. Seperti penjelasan yang telah penulis uraikan sebelumnya mengenai program-program pembangunan infrastruktur fisik, penulis dalam penelitiannya telah menemukan beberapa program-program pembangunan yang berupa infrastruktur non fisik pada Distrik Aimas Kabupaten Sorong diantaranya :

Tabel 2. Data Pembangunan Non Fisik Distrik Aimas Kabupaten Sorong 2014

NO	JENIS KEGIATAN	REALISASI
1	Sosialisasi perda no 17 thn 2003 tentang IMB	Terlaksana
2	Sosialisasi tentang retribusi sampah PERDA no 2 thn 2004	Terlaksana
3	Sosialisasi tentang penanganan miras untuk generasi muda dikel.Klawuyuk	Terlaksana
4	Sosialisasi tentang PBB	Terlaksana

Sumber : Kantor Distrik Aimas Kabupaten Sorong

Upaya/Peran Aparat Distrik Aimas Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari perubahan dan perkembangan kondisi ekologi administrasi publik, terutama yang terjadi di Indonesia saat ini sebagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyesuaian-penyesuaian dalam penerapan strategi pembangunan.

Dalam hubungan ini, tantangan yang dimaksudkan meliputi :

- a. Penerapan Otonomi Daerah;
- b. Globalisasi informasi;
- c. Netralitas Pegawai Negeri;
- d. Penerapan multi partai dalam sistem politik;
- e. Perdagangan bebas dan Semangat reformasi dengan segala implikasinya.

Dalam suatu Negara atau masyarakat, administrasi memegang peranan yang sangat penting, terutama di Negara-negara modern, maka pemerintah mempunyai peranan yang sangat menonjol. Demikian pula dengan negara demokrasi, pemimpin tersebut dan berkembang dalam masyarakat kemudian menjadi terkenal dan terpilih menjadi pemimpin Negara atau pemimpin bangsa.

Dalam manajemen organisasi modern, aspek pemerintah sangat penting. Maka kiranya wajar apabila masalah pemerintah mendapat pengkajian yang lebih serius oleh para ahli. Menurut Dalton MC. Farlan (2001:214) mengemukakan : *Leadership as the process by which an executive imaginatively direct, guides, or influences the work of other, on choosing and attaining particular ends.* Bahwa pemerintah sebagai suatu proses dimana pimpinan memberikan pencerahan atau mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dalam pengertian sederhana dapat ditandaskan bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan, struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan Negara, serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsih Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam hubungan ini kualitas perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjawab tantangan perubahan tersebut dengan tetap berpijak pada strategi pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan konsep pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan menghasilkan rencana pembangunan dengan strategi untuk menjawab segala tantangan serta sasaran yang diinginkan yang didukung oleh tingkat kemampuan (*capability*) aparat birokrasi pemerintah mengantisipasi faktor-faktor yang berpengaruh baik internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun eksternal berupa berbagai peluang maupun ancaman yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

Setiap pelaksanaan pembangunan yang merupakan dilaksanakan oleh instansi terkait seperti PU yang punya tugas untuk melaksanakan tugas jalan, lalu melaksanakan jalan tersebut. Ada jalan untuk proyek dari propinsi dalam arti dianggarkan oleh pemerintah propinsi yang dibiayai oleh APBD T.K. I propinsi dan juga ada yang dibiayai oleh APBN dari pusat, dan juga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (PU Kabupaten Sorong) yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Sorong dimana proyek pembangunan tersebut dilaksanakan diwilayah misalnya diDistrik Aimas Kabupaten Sorong , maka pegawai negeri yang berada diDistrik Aimas Kabupaten Sorong secara otomatis dapat dilibatkan dalam pembangunan tersebut baik secara langsung dilapangan (fisik) maupun (non fisik), non fisik disini dalam arti pegawai memberi pengertian kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat pada tanggal 26 Oktober 2015 di kemukakan bahwa : “ apatur pemerintahan selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap pembangunan yang selama ini berjalan di Distrik Aimas Kabupaten Sorong hal ini penting karena banyak sekali masyakat merasa tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah padahal selama ini pemerintah selalu melakukan pembangunan pada lingkungan masyarakat setempat”.

Apabila ada masyarakat/warga yang tidak mengerti arti pembangunan tersebut, misalnya jalan dilingkungan, maka pegawai dikelurahan dapat memberi pengertian bahwa pembangunan ini seutuhnya untuk kepentingan masyarakat yang ada di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur pemerintahan pada tanggal 27-29 Oktober 2015, menyatakan bahwa : “ aparat pemerintahan di Distrik Aimas Kabupaten Sorong selalu memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada masyarakat setiap program yang telah di laksanakan hal ini di lakukan agar masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan yang dilaksanakan di Distrik Aimas Kabupaten Sorong ”.

Dengan mencermati uraian diatas dapat disimpulkan bahwa selama ini pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sorong dan Distrik Aimas Kabupaten Sorong secara langsung melibatkan pegawai yang berada diDistrik Aimas Kabupaten Sorong .

Sebagai ujung tombak dan coordinator pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka peran lurah sangat penting dan strategis. Untuk itu lurah harus memiliki kemampuan untuk mengelolah potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya baik aparatur pemerintahan dan sumber daya alam dan masyarakatnya. Untuk itu lurah harus dibekali oleh berbagai pengetahuan mengenai program-program pelaksanaan pembangunan kelurahannya.

Dalam perencanaan pembangunan perlu adanya penekanan orientasi pada tugas pokok atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yaitu yang pada dasarnya mencakup kewajiban melindungi rakyat (*to protect the people*), mengatur rakyat (*to regulate the people*) dan melayani rakyat (*to serve the people*).

Tugas pokok pemerintah tersebut dapat dijabarkan kedalam berbagai urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yaitu :

- a. Pemenuhan kepentingan masyarakat (*public interest*) maupun mengatasi masalah-masalah masyarakat (*public affairs*);
- b. Pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*);
- c. Peningkatan kemampuan finansial pemerintah (*revenue improvement*); dan
- d. Kewenangan mengatur (*regulate*).

Keberhasilan pelaksanaan kewajiban pemerintah tersebut dapat diukur dari keberhasilan pelaksanaan urusan-urusan tersebut, terlebih dalam mengukur eksistensi kewenangan penyelenggaraan otonomi daerah bagi setiap “daerah”. Dalam hubungan ini pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan didasarkan pada standard pengukuran yang mencakup :

- a. Standard Normatif : yaitu ketataatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUD 1945, Ketetapan MPR, UU, PP dan lain sebagainya;

- b. Standard Substantif : yaitu penilaian publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menjadi pendapat umum.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) berarti pula penerapan nilai-nilai demokrasi yang mantap. Untuk mendukung terwujudnya *Good Governance*, diperlukan pula adanya keseimbangan aktualisasi peran dari elemen-elemen "*Trias Politica*" yang artinya tidak ada dominasi dari salah satu elemen apakah itu eksekutif – legislatif maupun yudikatif.

Kendala Atau Masalah Yang Dihadapi

Pegawai Negeri Sipil menempati kedudukan mulia, yaitu sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah, dan pembangunan. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang disiplin Pegawai Negri Sipil.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah :

- a. Kurang efektifnya kinerja aparat pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh pegawai pemerintah baik di daerah maupun di pusat.
- c. optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *good government* dan dokumen / arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
- d. penataan dan peningkatan kapasitas pegawai agar lebih professional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- e. peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan, termasuk prosedur kerja pada tingkatan dan kegiatan instansi pemerintahan.

Pemecahan Masalah

Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan diDistrik Aimas Kabupaten Sorong , maka pemerintah harus berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka dituntut sumber daya aparatur pemerintah dapat ditingkatkan untuk mencapai tuntutan reformasi birokrasi pemerintah yang trampil dan bijaksana untuk mencapai tujuan yang telah dimaksud.

Dalam era globalisasi dan informasi-transformasi yang cepat dan tuntutan serta kepekaan masyarakat yang semakin meningkat dan tajam, mengharuskan aparatur pemerintah diDistrik Aimas Kabupaten Sorong untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Tidak salah

lagi, kalau masalah optimalisasi sumber daya manusia menjadi titik sentral. Artinya apapun bentuk tuntutan dan tantangan yang muncul apabila sumber daya manusia aparatur pemerintah di Distrik Aimas Kabupaten Sorong terus ditingkatkan dan dimanfaatkan, semua dapat berjalan baik.

Salah satu unsur aparatur pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang perannya sangat penting dan menentukan, terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Distrik Aimas Kabupaten Sorong. SDM PNS selama ini masih dirasakan belum maksimal dimanfaatkan menjadi aparatur yang berhasil guna, efisien dan efektif, berdisiplin, berkualitas tinggi, bersih dan berwibawa. Maka ketika masalah SDM banyak disorot perhatianpun banyak mengarah kepada PNS yang sangat potensial. Baik aparatur yang bertanggung jawab pada bidang perekonomian dan keuangan, maupun bidang pelayanan masyarakat lainnya.

Dalam mengantisipasi dinamika masyarakat dengan berbagai aspek kebutuhan dan tuntutan akan pelayanan sebaik-sebaiknya, GBHN 1993 telah memberikan arah yang sangat jelas mengenai pola dan system pembinaan kepegawaian. Arahan GBHN ini sangat tepat dengan tuntutan pembangunan bidang kepegawaian. Maksudnya, bahwa system pembinaan dan pengembangan karier ditekankan oleh GBHN adalah system prestasi kerja, bukan system karier yang menonjolkan aspek senioritas.

Sebagaimana diketahui, UU No.8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian menganut pembinaan PNS melalui perpaduan system karier dan system prestasi kerja. Unsur-unsur yang baik dalam system karier dan system prestasi kerja dipadukan secara serasi. Dalam praktiknya, system senioritas dalam pembinaan dan penjurangan karier PNS masih tetap menonjol yang menurut banyak kalangan system tersebut tidak tepat lagi untuk dipertahankan dalam pelaksanaan tugas jabatan yang menuntut kemampuan profesional.

Pembangunan aparatur Negara harus diarahkan pada makin terwujudnya dukungan administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan untuk mewujudkan system administrasi Negara yang makin handal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan terhadap dinamika perubahan. Penataan organisasi, penyempurnaan ketatalaksanaan, pemantapan system informasi, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembangunan di Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan didukung dengan pendekatan pembangunan manusia, sebagai manifestasi paradigma pembangunan manusia diperlukan beberapa persyaratan yaitu :

1. Kinerja pegawai dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus lebih profesional karena aparat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.
2. Pemerintah harus berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Dalam menetapkan suatu peraturan harus ditunjang dengan kedisiplinan pegawai negeri agar kinerja aparat pemerintah dapat berjalan dengan baik dalam menunjang pelaksanaan pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suryono, 2001, Teori dan Isu Pembangunan, , UM-Press Malang
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1979, Perencanaan Pembangunan, , PT. Gunung Agung. Jakarta
- Dr. Haryono Sudriamunawar, Drs., MS, 2002, Pengantar Studi Administrasi Negara, Penerbit cv. Mandar Maju, Halaman 15 Bandung
- Flippo, Edwin B, 1995, **Manajemen Personalia**, Edisi VI, PT. Erlangga, Jakarta.
- Hasibuan, S. P, Melayu, 2007, **Manajemen Sumber daya Manusia**, cetakan kesepuluh, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- HR. Riyadi Soeprpto, 2000, Administrasi Pembangunan, , UM-Press Malang
- Inu Kencana Syafii & Djamaludin Tandjung, ed., 1999, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta. Jakarta,
- LEMHANNAS, 1997. PEMBANGUNAN NASIONAL, penerbit PT.BALAI PUSTAKA-LEMHANNAS, JAKARTA
- Matutina, 2001. **Manajemen Sumber daya Manusia**, cetakan kedua, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Moeljarto Tjokrowinoto, 1999, Pembangunan : Dilema dan Tantangan, , Pustaka Pelajar Offset Yogyakarta
- Muh. Irfan Islamy, 1998, Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FIA – Universitas Brawijaya Malang.
- Muhadam Labolo, Prof. Muchlis Hamadi, M.P.A., Ph.D.2002, Pemahaman Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangnya

- Osborne, D. dan Gaebler., 1992, *Reinventing Government*, Massachusetts: Addison – Wesley Publishing Company, Inc.
- ³Paul.A. Samuelson, *Ekonomi*, Ninth Edition, McGraw-Hill Kogakusha, Ltd, 1973, Halaman 8 Tokyo :
- Riorini, Sri vandayuli, **“Quality Performance dan Komitmen Organisasi”**, *Jurnal Media Riset Bisnis dan Manajemen*. Volume 4, Nomor 3, 2004, hal 253-274.
- Stoner, J.A.F. & Freeman, R.Edward, ed., 1998, *Management, Part I & II*, alih bahasa : Alexander Sindoro, PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Soesilo Zauhar, 2001, *Administrasi Publik*, , UM-Press Malang
- ¹Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Penerbit CV. Haji Masagung, Cetakan 1, Jakarta 1993, Halaman 142.
- ²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Satu Pengantar*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan 19, Jakarta 1994, Halaman 319
- ³Paul.A. Samuelson, *Ekonomi*, Ninth Edition, Tokyo : McGraw-Hill Kogakusha, Ltd, 1973, Halaman 8
- Winarna Surya Adisubrata, 1987, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Yogyakarta, AMP YKPN